



# Penyedia Jasa Otoped Listrik Bisa Dihentikan



ELANG KHARISMA DEWANGRADAR/JOGJA

**HARUS TERTIB:** Pemilik persewaan mengangkat otoped listrik dengan motor menuju kawasa Tugu, Jogja, kemarin (3/3). Agar tidak menimbulkan kerumunan, otoped listrik harus dibatasi dan ditempel nomor lambung.

Jika Tidak Bisa Awasi  
Penyewa yang Ugal-ugalan

**JOGJA, Radar Jogja** - Aktivitas otoped listrik di kawasan Malioboro masih

jadi sorotan. Maraknya pengguna yang ugal-ugalan menjadi perhatian Pemkot Jogja. Tak segan aktivitas persewaan bakal dihentikan jika penyedia jasa tidak bisa mengontrol gerak gerak penyewa. **► Baca Penyedia... Hal 3**



Tidak boleh melawan arus. Kalau di jam tertentu bisa wira-wiri saat kosong full pedestrian, karena non motorized ya boleh. Tapi kalau pas ada kendaraan bermotor, ya kira-kira dong, itu berbahaya."

**HARYADI SURYUTI**

Wali Kota Jogja



FOTO: WINDA ATIKA IPRADAR JOGJA, GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

## Penyedia Jasa Otoped Listrik Bisa Dihentikan

*Sambungan dari hal 1*

Aktivitas otoped listrik yang menjadi keluhan terutama melawan arus di jalan raya saat kendaraan bermotor juga melintas hingga kebut-kebutan di lorong-lorong toko. Hal ini juga dikeluhkan warga net di *Twitter* beberapa hari lalu.

"Selamat malam kiranya dinas terkait dapat memberi arahan untuk penyedia jasa sewa skuter dan sepeda di sepanjang Jalan Malioboro agar dapat mengedukasi konsumennya supaya tidak melawan arus," kutipan dalam akun [@iblisjelita0274](https://twitter.com/iblisjelita0274) yang di-repost oleh akun [@jogjaupdate](https://twitter.com/jogjaupdate).

Wali Kota Jogja Haryadi Suryuti (HS) mengatakan, sejatinya para penyewa bisa melintas bebas di Jalan Malioboro dengan jam-jam tertentu, yaitu pada saat diterapkannya *full* pedestrian pukul 18.00-21.00. Sebab, selama jam itu diberlakukan bebas kendaraan bermotor. "Tidak boleh melawan arus. Kalau di jam tertentu bisa wira-wiri saat kosong *full* pedestrian, karena non motorized ya boleh. Tapi kalau pas ada kendaraan bermotor, ya kira-kira dong, itu berbahaya," katanya belum lama ini.

HS menjelaskan gerak gerak para penyewa otoped harus tetap diawasi dan dikontrol oleh para penyedia jasa. Tidak lantas tanpa pengawasan. Tak segan, Pemkot bakal mengambil langkah tegas jika penyedia jasa melakukan pelanggaran. Terutama lepas kontrol penyewa otoped listrik yang mengakibatkan para pengendara atau pejalan kaki tidak nyaman. "Pengelolanya yang kena, bisa

saya stop, karena dia menyewakan (otoped listrik) wisatawan dapat akses sewa. Jadi harus monitor jangan hanya menyewakan, harus diawasi. Kalau melanggar distop, jangan malah membuat pelanggaran," ujarnya.

Tak hanya melawan arus di jalan raya, HS tak menampik jasa penyewaan skuter listrik itu biasa hingga larut malam. Tak jarang ada beberapa pengguna yang memanfaatkan lorong Malioboro yang sepi untuk kebut-kebutan. "Itu juga bisa kita beri sanksi ke pengelolanya. Di situ kosong, terus balapan, itu ya mengganggu," jelasnya.

Oleh karena itu, selain penyedia jasa perlu mengontrol dan mengawasi para penyewa otoped listrik, mereka juga diminta untuk memberikan edukasi kepada para penyewa saat hendak menyewa otoped listrik itu. Agar saat menggunakannya tidak dengan kecepatan tinggi dan asal melintas.

"Jangan cuma nongkrong, terima duit tapi (otoped) dipakai buat apa penyedia jasa nggak tahu. Mohon kerjasamanya, diawasi kalau ada pelanggaran di jalanan. Dia juga harus punya *rule* dong, orang-orang yang menyewa diedukasi pembatasan kecepatannya biar tertib. Petugas sudah banyak, kalau masih ada pelanggaran, berarti petugas lalai," tandasnya.

Sejauh ini Pemkot pun telah melakukan pembatasan penggunaan otoped listrik. Sejak akhir tahun lalu, otoped listrik yang boleh beroperasi hanya berjumlah 200 unit. Pembatasan itu juga harus

dibarengi dengan nomor lambung atau nomor otoped listrik di setiap unitnya. "Ini kan untuk memudahkan kita memonitor. Jadi sepanjang Malioboro yang menyewakan alat itu setiap skuter harus ada nomornya," tambahnya.

Pihaknya tidak segan memberi sanksi kepada penyedia jasa jika ketahuan memanipulasi angka atau nomor skuternya. Mengingat hingga kini belum ditemukan skuter yang terdapat nomor lambung. "Misal ada nomor 26, tapi angkanya itu ada 4 yang sama. Kita beri sanksi nanti," imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengatakan, pemberian nomor lambung perlu berkoordinasi dengan OPD lain. Sejauh ini pihaknya hanya mengatur otoped listrik sesuai Permenhub Nomor 45/2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Pengerak Motor Listrik.

"Kami *kan* menyesuaikan dengan aturan yang ada. Itu *kan* (otoped) lebih kepada alat transportasi dengan tipe tertentu. Kalau ada kebijakan dari pimpinan seperti apa, itu kita coba tindak lanjut teknisnya. Hanya apakah itu sebagai daya tarik wisata atau apa *kan* perlu dialami," katanya.

Keberadaan skuter listrik di Malioboro, kata Agus, dibolehkan melintas. Namun akses seperti di jalan raya tetap dilarang. "Kalau lewat di tempat mana *kan* ada aturannya di Permenhub. Tapi kalau sampai ke teknis, kami akan koordinasi karena ini lintas kepentingannya," tambahnya. (*wia/laz/by*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005